

## Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015

*Penelitian Ini Didanai Oleh Hibah Muhammadiyah Gel.1 Tahun 2017*

**Jusuf Harsono**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

[jsharsono@gmail.com](mailto:jsharsono@gmail.com)

### Abstract

Plurality of political attitudes of citizens Muhammadiyah Ponorogo in the elections in 2015 is an interesting phenomenon because almost all citizens and sympathizers of this organization gives full support to the partner Regent and Vice Regent promoted by the National Mandate Party. This study to find out more about political attitudes of citizens muhammadiyah shown in local elections (Election) Ponorogo. Moreover, the research also seek out further orientations are used as a handle by Muhammadiyah cadres and elite that are part of a successful team. Informants in this study is regular and elite members or directors of the Muhammadiyah organization spread over several districts. Data collection in studies using interviews and documentation. The final goal of this study was to determine the political direction of Muhammadiyah then it could be a foundation in nominating candidates for the next general election

**Keyword:** *Election, Muhammadiyah, Political Attitude.*

### Abstraksi

Sikap politik warga Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 sangat menarik dibahas karena anomali dari jumlah pemilih yang berupa simpatisan organisasi ini memberikan dukungan kepada pasangan Bupati dan serta Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya dalam penelitian ini bertujuan mencari tahu lebih jauh tentang sikap politik warga muhammadiyah yang ditunjukkan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Ponorogo. Adapun informan dalam penelitian ini adalah warga Muhammadiyah dan elit organisasi Muhammadiyah yang tersebar di beberapa kecamatan. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah dengan mengetahui arah politik warga Muhammadiyah maka bisa dijadikan landasan dalam mengukung calon pada pemilihan umum kedepan.

**Kata Kunci:** *PILKADA, Muhammadiyah, Sikap Politik*

<i>Submite</i>	: 15 Agustus 2017
<i>Review</i>	: 15 November 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Januari 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: <a href="mailto:audra.jovani@uki.ac.id">audra.jovani@uki.ac.id</a>

## Pendahuluan

Perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015 adalah PEMILUKADA (pemilihan Kepala Daerah Langsung) yang pertama terjadi di Ponorogo, dimana pada saat itu juga berlangsung PEMILUKADA di hampir 200 Kota dan Kabupaten serta Propinsi di Indonesia. Perhelatan PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo yang menarik adalah besarnya jumlah warga Muhammadiyah di Ponorogo ikut andil besar dalam menentukan kemenangan calon kepala daerah di PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo. Besarnya pengaruh dari organisasi Muhammadiyah ini selanjutnya menjadikan “*pihak luar*” tertarik untuk menggandeng Muhammadiyah untuk mendukung calon-calon yang telah disiapkan demi meraih suara dari warga Muhammadiyah.

Sekalipun Muhammadiyah adalah sebuah *Interest group*, menurut pemahaman Gabriel Almond (Mas'ood, 1984) merupakan organisasi yang tidak berkehendak berebut kekuasaan publik secara langsung dalam peristiwa politik, seperti Pemilu tetapi para elitnya tidak bisa berdiam diri dalam percaturan politik setelah melakukan interpretasi terhadap situasi. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tidaklah menjadi organisasi yang mayoritas di Ponorogo, tetapi Muhammadiyah selalu menjadi organisasi yang ikut menentukan kemenangan bakal calon Bupati di Ponorogo. Muhammadiyah dengan menjadi organisasi yang ikut menentukan dalam penentuan kemenangan Calon Bupati di Ponorogo, tetapi perolehan suara yang diperoleh oleh warga muhammadiyah ataupun para elit muhammadiyah ternyata tidak menunjukkan angka maksimal.

Gerakan Muhammadiyah dalam bidang politik telah sesuai dengan Kittahnya yaitu dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti dan proposisi yang sebenar-benarnya dimana Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis dan konseptual. Gerakan organisasi Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan juga bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah dalam Politik ini ditegaskan kembali pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 yang menegaskan bahwa *pertama*, Organisasi Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, yang mana tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu

Partai Politik atau organisasi apapun. *Kedua*, setiap anggota organisasi Muhammadiyah sesuai hak asasi yang diberikan keleluasaan untuk memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah. (Wiharto, 2017)

Kuatnya pengaruh dari organisasi ini yang menjadi pertimbangan bagi calon yang ingin maju dalam PILKADA atau pemilihan legislatif. Ketidakmaksimalan suara disaat PEMILKADA Kabupaten Ponorogo berbanding terbalik dengan pemilihan Presiden tahun 2014 dimana tahun 2004 hampir semua warga serta sipatisan Muhammadiyah menyumbang suara lebih dari 60.000 diberikan dukungan kepada Prof. Dr. Amien Rais sebagai calon Presiden RI. Sementara pada perhelatan Pilkada tahun 2005 Kabupaten Ponorogo, warga Muhammadiyah menunjukkan adanya perpecahan suara dengan tidak bisa terfokus pada satu calon. Perbedaan soliditas warga Muhammadiyah tersebut tentu menarik untuk dicermati dan diteliti mengingat selama ini komunitas ini dikenal sebagai komunitas yang mempunyai sikap politik yang solid. Dengan demikian, maka menarik sekali jika melihat lebih jauh tentang arah politik warga Muhammadiyah baik warga Muhammadiyah biasa maupun elit dan pimpinan di tingkat daerah dalam menyumbangkan suaranya pada pilkada tahun 2015. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melihat lebih jauh tentang bagaimana sikap politik warga Muhammadiyah dalam PEMILUKADA 2015?

## Metode

Jenis penelitian yang akan dipakai untuk menjawab rumusan masalah adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif dimana akan ditekankan kepada analisis proses penyimpulan data secara deduktif dan induktif. Maka dari itu pendekatan kualitatif yang dipakai oleh peneliti bukan tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Rasionalitas Sikap Pemilih

Organisasi Muhammadiyah sejak kelahirannya dikenal sebagai gerakan islam yang terus berkiprah di ranah dakwah Muhammadiyah dan tidak berjuang di dalam politik serta tidak memiliki hubungan dengan kekuatan politik. Muhammadiyah membentengi dirinya dari Politik dengan Kittah (Garis Perjuangan) yang sudah mendarah daging didalam persyarikatan ini. Namun seiring dengan perkembangan jaman, setelah masa reformasi dimulai muncul kecenderungan untuk melibatkan Muhammadiyah dalam persentuhan dengan dunia politik. Pendirian partai politik dalam pemilihan umum berusaha menarik Muhammadiyah pada dukungan-dukungan politik tertentu dan pihak-pihak yang berkepentingan berusaha memperoleh dukungan politik Muhammadiyah tetapi sekali lagi Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. (Nashir, 2008, hal. 1-2)Jurgen Habernas, dalam Piliang (Piliang, 2004), lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan rasional adalah sebagai tindakan bertujuan. Pendapat bahwa rasionalitas politik akan berkaitan dengan pilihan-pilihan, tindakan dan keputusan yang diambil dalam rangka mencapai sebuah tujuan politik tertentu. Tindakan rasional dalam sikap politik seseorang dijelaskan lebih lanjut mempertimbangkan segala resiko yang akan diterima karena sudah bertentangan dengan *main stream* dan semangat kolektifitas.

Jugen Habernas, dalam Piliang (Piliang, 2004), membedakan dua jenis rasionalitas lebih jauh dimana yang *pertama*, rasionalitas dari bawah yaitu rasionalisasi yang berkembang secara alamiah di kalangan masyarakat kelas bawah tanpa adanya komando atau koordinasai dari atas.*Kedua*, rasionalisasi dari atas yaitu rasionalisasi yang dikendalikan atau direkayasa oleh kelompok-kelompok elit dalam konteks politik massa. Piliang selanjutnya membedakan rasionalisasi politik mejadi dua yaitu *pertama*, berdasarkan pada pikiran praktis bahwa tujuan pergantian pimpinan untuk mencapai sebuah kondisi pragmatis kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran umum. Hal ini oleh piliang dinamakan sebagai *substantince practical rationality*.*Kedua*, untuk yang ini ia menyebut tujuan pergantian kepemimpinan adalah cara menciptakan perubahan sebagainya. Affan Gafar (Gafar, 2002, p. 96) menganggap bahwa pendekatan secara cultural masih relevan dalam memahami politik Indonesia secara kontemporer. Selanjutnya ia menambahkan bahwa pola pembentukan dukungan dan

mobilisasi politik pada masa pemilihan umum, akan sangat tepat dengan menggunakan pendekatan cultural ketimbang secara struktural.

Sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya warga Muhammadiyah Ponorogo juga menunjukkan budaya politik yang kurang lebih sama, yaitu budaya politik yang *paternalistic*, yaitu sebuah sikap politik yang menganggap bahwa seseorang tertentu mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan warga yang lain. Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki para elit itulah yang menjadikan warga mengikuti langkah-langkah politik yang diambil para elit Muhammadiyah dalam Pilkada tahun 2005. Pluralitas atau kemajemukan sikap politik elit Muhammadiyah telah menjadi referensi utama warga dalam menentukan pilihan untuk mendukung para Cabup-cawabup tersebut. Kedekatan seseorang pada elit yang kebetulan menjadi bagian dari tim sukses mempunyai kontribusi yang besar terhadap pluralitas sikap politik warga Muhammadiyah Ponorogo tersebut.

## 2. Deskripsi daerah Penelitian

### a. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111° 07' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 07° 49' hingga 08° 20' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Magetan, Madiun dan Nganjuk; Selatan – Kabupaten Pacitan; Barat – Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah; Timur – Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan serta terbagi dalam 307 kelurahan / desa. (BPS, 2016, hal. 3-5)

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota provinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo sendiri terletak pada 111° 07' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' hingga 8° 20' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten

Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km<sup>2</sup> habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan.(BPS, 2016, hal. 3-5)

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah kabupaten ponorogo yaitu 79 % terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18° s/d 31° Celcius. Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km<sup>2</sup>) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.(BPS, 2016, hal. 3-5)

**PETA WILAYAH KABUPATEN PONOROGO**



*Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. iii)*

**b. Data Kependudukan**

Data jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang dihasilkan dari proyeksi BPS yaitu sebesar 867.393 jiwa pada tahun 2015. Kecamatan Ponorogo tercatat mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 76.785 jiwa, diikuti Kecamatan Babadan 65.452 jiwa dan

Kecamatan Ngrayun sebanyak 56.373 jiwa. Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 mencapai 632 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ponorogo yaitu 3.442 jiwa per km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Puduk yaitu 192 jiwa per km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang. Tercatat rasio jenis kelamin sebesar 99,91 yang berarti pada setiap 1.000 penduduk perempuan terdapat sekitar 999 penduduk laki-laki. (BPS, 2016, hal. 46)

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2015**

Kecamatan District	Jenis Kelamin Sex			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ngrayun	28 166	28 207	56 373	99,85
2. Slahung	24 269	25 155	49 424	96,48
3. Bungkal	17 013	17 577	34 590	96,79
4. Sambit	17 688	17 996	35 684	98,29
5. Sawoo	26 575	27 561	54 136	96,42
6. Sooko	10 883	11 091	21 974	98,12
7. Puduk	4 643	4 735	9 378	98,06
8. Pulung	23 332	23 349	46 681	99,93
9. Mlarak	20 643	16 184	36 829	127,56
10. Siman	21 803	21 067	42 870	103,48
11. Jetis	14 132	14 898	29 030	94,86
12. Balong	20 343	21 283	41 628	95,59
13. Kauman	19 437	19 829	39 266	98,02
14. Jambon	19 261	19 880	39 141	96,89
15. Badegan	14 627	14 750	29 377	99,17
16. Sempung	17 612	18 005	35 617	97,82
17. Sukorejo	25 710	25 032	50 742	102,71
18. Ponorogo	38 040	38 745	76 785	98,18
19. Babadan	32 831	32 621	65 452	100,64
20. Jenangan	26 611	26 345	52 956	101,01
21. Ngebel	9 881	9 579	19 460	103,15
<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>433 504</b>	<b>433 889</b>	<b>867 393</b>	<b>99,91</b>

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/Indonesia Population Projection 2010–2035

Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 50)

Dari data diatas bisa dilihat kalau tingkat persebaran usia penduduk Kabupaten Ponorogo terbanyak adalah pada usia 40 sampai dengan 44 tahun dimana usia ini merupakan usia produktif.

### c. Data Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan, 307 desa/kelurahan, 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT). Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari 45 orang, dengan jumlah 40 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi adalah sarjana (S1).(BPS, 2016, hal. 19)

**Tabel 2**  
**Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan/Dusun, RW dan RT di Kabupaten Ponorogo 2015**

Kecamatan <i>District</i>	Kelurahan/ Desa <i>Village</i>	Lingkungan/ Dusun <i>Circle Society</i>	Rukun Warga <i>Pillar of Member</i>	Rukun Tetangga <i>District Society</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ngrayun	11	40	145	439
2. Slahung	22	61	154	413
3. Bungkal	19	63	129	340
4. Sambit	16	46	93	302
5. Sawoo	14	54	160	490
6. Sooko	6	27	106	257
7. Pudak	6	19	31	79
8. Pulung	18	67	165	465
9. Mirak	15	49	104	267
10. Siman	18	45	95	289
11. Jetis	14	41	81	216
12. Balong	20	65	121	342
13. Kauman	16	54	113	303
14. Jambon	13	44	76	278
15. Badegan	10	34	45	229
16. Sampung	12	44	88	320
17. Sukorejo	18	58	139	388
18. Ponorogo	19	44	119	405
19. Babadan	15	56	123	480
20. Jenangan	17	60	120	402
21. Ngebel	8	31	67	165
<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>307</b>	<b>1.002</b>	<b>2.274</b>	<b>6.869</b>

Sumber/Source: Badan Pembendayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kab. Ponorogo/Board of Society and Village Government of Ponorogo Regency

*Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016*(BPS, 2016, hal. 21)



#### d. Data Perwakilan di DPRD

Jumlah perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, perolehan kursi terbanyak dari 10 Partai Politik yang ada bisa dilihat dari tabel dibawah ini bahwa Partai Golkar memiliki kursi terbanyak yaitu sejumlah 10 kursi dan disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah 7 kursi. Tiga partai berikutnya yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai PAN memiliki kursi yang sama di DPRD Kabupaten Ponorogo yaitu sejumlah 6 kursi. Sedangkan partai PID-P memiliki 5 kursi dan PKS 2 kursi, serta Partai PPP, Nasdem, dan Hanura memiliki masing-masing 1 kursi di DPRD Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 3**  
**Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai/Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo tahun 2015**

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Golkar	8	2	10
2. PKB	7	-	7
3. Gerindra	5	1	6
4. Partai Demokrat	6	-	6
5. PAN	5	1	6
6. PDI-P	4	1	5
7. PKS	2	-	2
8. PPP	1	-	1
9. Nasdem	1	-	1
10. Hanura	1	-	1
<b>Jumlah Total</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>45</b>

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo/Secretary DPRD of Ponorogo Regency

Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 22)

**Tabel 4**  
**Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai/Golongan dan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo 2015**

Partai Politik Political Parties	Tingkat Pendidikan Education						Jumlah Total
	SD Primary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	Diploma 3 Dilpoma	Strata 1 Bachelor	Strata 2 Magister	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Partai Golkar	-	-	2	-	7	1	10
2. PKB	-	-	1	-	5	1	7
3. Gerindra	-	-	2	-	4	-	6
4. Partai Demokrat	-	-	-	-	3	3	6
5. PAN	-	-	1	-	2	3	6
6. PDI-P	-	-	-	-	3	2	5
7. PKS	-	-	1	-	1	-	2
8. PPP	-	-	-	-	1	-	1
9. Nasdem	-	-	-	-	1	-	1
10. Hanura	-	-	-	-	1	-	1
<b>Jumlah Total</b>	-	-	7	-	28	10	45

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo/Secretary DPRD of Ponorogo Regency

Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 23)

Dari tabel diatas kita bisa melihat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo tahun 2016. Jika kita lihat secara seksama dari tabel diatas maka masih ada anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sejumlah 7 anggota. Tetapi disisi lain juga telah terdapat anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang memiliki tingkat pendidikan S2 yang sejumlah 10 anggota sedangkan sisanya berpendidikan S1. Harapan yang timbul dari banyaknya anggota dewan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi adalah setiap peraturan atau ide yang dimunculkan dari wakil rakyat ini bisa sangat bagus terutama untuk pembangunan Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 5**  
**Jumlah Keanggotaan DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Partai di**  
**Kabupaten Ponorogo 2015**

Partai Politik Political Parties	Daerah Pemilihan Constituency						Jumlah Total
	I	II	III	IV	V	VI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Partai Golkar	2	2	2	2	1	1	10
2. PKB	2	1	1	1	1	1	7
3. Gerindra	-	1	1	2	1	1	6
4. Partai Demokrat	1	1	1	1	1	1	6
5. PAN	1	1	1	1	1	1	6
6. PDI-P	1	1	1	1	1	-	5
7. PKS	-	1	1	-	-	-	2
8. PPP	-	-	-	1	-	-	1
9. Nasdem	-	-	-	-	-	1	1
10. Hanura	-	-	-	-	-	1	1
<b>Jumlah Total</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>45</b>

Catatan/Note : Daerah Pemilihan/Constituency

I : Kecamatan/District Ponorogo, Babadan

II : Kecamatan/District Marak, Siman, Jetis, Jenangan

III : Kecamatan/District Sawoo, Sooko, Pudak, Pulung, Ngebel

IV : Kecamatan/District Ngrayun, Slahung, Bungal, Sambit

V : Kecamatan/District Balong, Jambon, Badegan

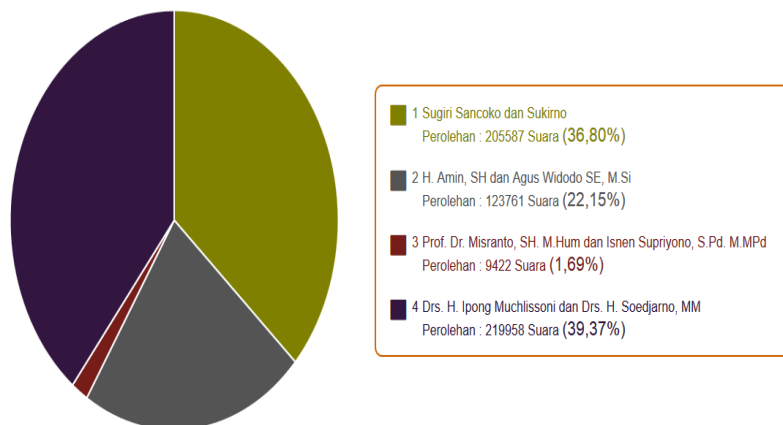
VI : Kecamatan/District Kauman, Sampung, Sukorejo

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo/Secretary DPRD of Ponorogo Regency

*Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 24)*

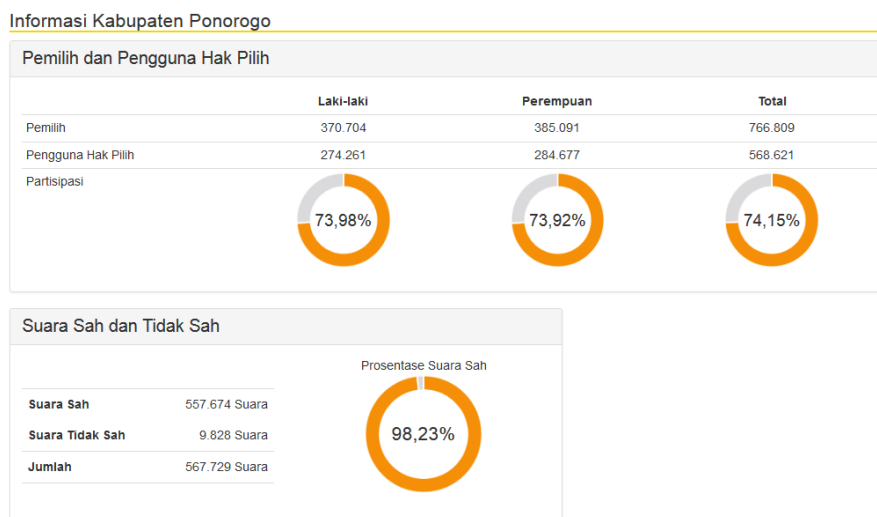
Dari data persebaran jumlah anggota DPRD menurut daerah pemilihan dan partai tahun 2015 maka bisa dilihat bahwa DAPIL IV menyumbang banyak kursi di DPR dimana DAPIL IV meliputi Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungal, dan Kecamatan sambit. Sedangkan DAPIL yang menyumbang paling sedikit jumlah anggota DPRD adalah berasal dari DAPIL V yaitu dari Kecamatan Balong, Kecamatan Jambon, dan Kecamatan Badegan.

**Tabel 6**  
**Hasil Perolehan Suara PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo 2015**



Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2015)

**Tabel 7**  
**Hasil Perolehan Suara PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo 2015**  
**(Menurut Jenis Kelamin dan Suara Sah)**



Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2015)

### 3. Analisis Data

#### a. Hasil Wawancara dengan Elit Muhammadiyah

Sikap Politik Organisasi Muhammadiyah pada PEMILUKADA tahun 2015 tidak melakukan politik praktis serta mendukung salah satu calon secara formal seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo Bapak Ahmad Munir. Lebih lanjut Ketua PDM menyatakan bahwa organisasi Muhammadiyah hanya memfasilitasi ketentuan pasangan calon dengan warga Muhammadiyah sehingga fungsi dari organisasi Muhammadiyah hanya sebagai fasilitator yang bersifat informal. Selain itu menurut Bapak Syarifan Nurjan (Wakil Ketua PDM Ponorogo), pada event PEMILUKADA Ponorogo tahun 2015 Organisasi Muhammadiyah juga melakukan edukasi politik kepada warga tentang PEMILUKADA.

Menurut Bapak Abidin Cahyono (Wakil Ketua PDM), Organisasi Muhammadiyah tidak condong ke salah satu calon untuk berpolitik secara praktis sehingga organisasi Muhammadiyah condong untuk melakukan silaturahmi politik seperti mendatangi calon dan menghadirkan calon bersama warga sebagai pendidikan politik bagi warga. Harapan Organisasi Muhammadiyah terhadap semua pasangan calon dalam event PEMILUKADA ini adalah untuk membuat perubahan Ponorogo kearah lebih baik, religius dan maju. Selain itu, terkait ada atau tidak arahan dari Organisasi Muhammadiyah untuk mendukung salah satu calon menurut ketua dan sekretaris PDM adalah sesuai dengan aturan PP Pusat Muhammadiyah dimana elit Muhammadiyah hanya menganjurkan warga untuk memilih dengan pilihannya sendiri dan mengedukasi warga tentang politik. Organisasi Muhammadiyah tidak memberikan anjuran atau dorongan kepada warganya untuk mendukung salah satu calon sehingga yang dilakukan hanya memberikan arahan untuk memilih calon yang mereka anggap baik.

#### b. Hasil Wawancara dengan Warga Muhammadiyah

Pasangan cabup dan cawabup pada PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo tahun 2015 terdapat empat pasangan calon dimana keempat pasangan calon tersebut adalah *Calon pertama*, Sugiri Sancoko-Sukirno yang diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Golongan

Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan Sejahtera. *Calon kedua*, pasangan *incumbent*, Amin-Agus Widodo yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Calon ketiga*, Misranto-Isnen Supriyono dari jalur perseorangan (independent). *Calon keempat*, pasangan Ipong Muchlissoni-Sujarno yang diusung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasional Demokrat.

Dari informan penelitian yang berjumlah 20 orang warga Muhammadiyah, calon yang dipilih dalam PEMILUKADA Ponorogo 2015 sangat beragam. Dari keempat calon yang ada, pilihan dari informan hampir merata kepada keempat pasangan calon. Pluralitas pilihan ini menandakan posisi Muhammadiyah atau Partai Amanat Nasional sebagai media politik Muhammadiyah memang tidak memberikan arahan untuk mendukung kepada salah satu pasangan calon dan memberikan kebebasan memilih kepada seluruh warga Muhammadiyah. Tidak adanya arahan dari elit Muhammadiyah ini berarti didalam tubuh Organisasi Muhammadiyah memang tidak ada himbuan dari atas, yaitu himbuan yang dikendalikan atau direayasa dari atas oleh kelompok-kelompok elit dalam konteks politik massa. Sebaliknya, Organisasi Muhammadiyah Ponorogo memberikan keleluasaan kepada setiap warganya untuk memilih pasangan calon sesuai hati nuraninya.

Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai gerakan Politik dari orang yang berlatarbelakang Organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu partai pendukung pasangan nomor urut empat yaitu Ipong Muchlissoni-Sujarno. Menurut hasil dari wawancara dengan informan di lapangan dari 20 sampel yang diambil hampir seimbang atau 11 orang informan mendukung pasangan calon nomor urut tiga yang juga didukung partai PAN. Sedangkan 9 orang informan mendukung pasangan yang diusung oleh partai PAN. Keseimbangan antara dukungan kepada calon yang diusung oleh PAN ini memperlihatkan tidak adanya *paternalistik* di dalam warga Muhammadiyah tetapi disisi lain kecenderungan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas dari setiap warga Muhammadiyah yang berperan penting dalam mempengaruhi pilihannya dalam PEMILUKADA 2015.

Hal yang menarik dari keberagaman pilihan yang diambil oleh warga Muhammadiyah ini adalah hampir semuanya mengatakan memilih pasangan calon tersebut untuk satu tujuan yaitu “*menginginkan Ponorogo yang lebih baik*”. Kecenderungan pilihan dan perhatian warga secara rasional lebih menitikberatkan wilayah administratif yaitu kota Ponorogo

daripada wilayah organisasi yang juga melekat pada diri mereka yaitu organisasi Muhammadiyah. Dualisme identitas diri ini memang kecenderungan akan menonjolkan salah satu identitas yang mereka anggap lebih besar ruang lingkungannya dan sangat mempengaruhi hidup suatu individu. Kecondongan pilihan warga ini juga sangat dipengaruhi karena tidak adanya anjuran pilihan dari organisasi Muhammadiyah untuk mendukung salah satu pasangan calon tetapi anjuran untuk memilih calon tertentu dilakukan oleh Partai Amanat Nasional sebagai gerakan Politik warga Muhammadiyah. Tetapi sekali lagi, sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya warga Muhammadiyah Ponorogo juga menunjukkan budaya politik yang kurang lebih sama yaitu budaya politik yang *paternalistic*. Budaya politik paternalistik sendiri merupakan sebuah sikap politik yang menganggap bahwa seseorang tertentu mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan warga yang lain. Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki para elit itulah yang menjadikan warga mengikuti langkah-langkah politik yang diambil para elit Muhammadiyah. Sedangkan para elit Muhammadiyah berada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Ponorogo dan bukan di partai maka dari itu mayoritas warga Muhammadiyah memiliki sikap politik yang majemuk atau bisa dikatakan tidak satu suara dan sangat *plural*.

Perbedaan sikap elit Muhammadiyah berpegang kepada sikap politik warga sehingga banyak warga Muhammadiyah untuk mengambil sikap politik sendiri-sendiri sesuai dengan cara pandang yang sangat praktis. Sebagian warga juga terbawa sikap politiknya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014. Warga persyarikatan terbagi menjadi pendukung caleg dari Golkar dan PAN. Fenomena ini berlanjut pada PEMILUKADA tahun 2015 sehingga perolehan suara terbanyak ada pada pasangan yang diusung oleh partai Golkar (Sugiri-Sukirno) dan PAN (Ipong-Sujarno).

## Kesimpulan

Sikap Politik Organisasi Muhammadiyah pada PEMILUKADA tahun 2015 tidak melakukan politik praktis serta mendukung salah satu calon secara formal serta organisasi Muhammadiyah hanya memfasilitasi ketentuan pasangan calon dengan warga Muhammadiyah sehingga fungsi dari organisasi Muhammadiyah hanya sebagai fasilitator yang bersifat informal

dan sarana edukasi politik kepada warga Muhammadiyah tentang PEMILUKADA. Organisasi Muhammadiyah tidak condong ke salah satu calon untuk berpolitik secara praktis sehingga organisasi Muhammadiyah condong untuk melakukan silaturahmi politik seperti mendatangi calon dan menghadirkan calon bersama warga sebagai pendidikan politik bagi warga. Harapan Organisasi Muhammadiyah terhadap semua pasangan calon dalam event PEMILUKADA ini adalah untuk membuat perubahan Ponorogo kearah lebih baik, religius dan maju.

Sesuai dengan aturan PP Pusat Muhammadiyah dimana elit Muhammadiyah hanya menganjurkan warga untuk memilih dengan pilihannya sendiri dan mengedukasi warga tentang politik, sehingga organisasi Muhammadiyah tidak memberikan anjuran atau dorongan kepada warganya untuk mendukung salah satu calon sehingga yang dilakukan hanya memberikan arahan untuk memilih calon yang mereka anggap baik. Sikap yang ditempuh oleh Organisasi Muhammadiyah ini selanjutnya berdampak kepada keberagaman pilihan yang diambil warga Muhammadiyah pada PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo 2015. Pluralitas pilihan ini menandakan posisi Muhammadiyah memang tidak memberikan arahan untuk mendukung kepada salah satu pasangan calon dan memberikan kebebasan memilih kepada seluruh warga Muhammadiyah. Tidak adanya arahan dari elit Muhammadiyah ini berarti didalam tubuh Organisasi Muhammadiyah memang tidak ada himbauan yang diberikan dari atas, yaitu himbauan yang dikendalikan atau direayasa dari atas oleh kelompok elit dalam konteks politik massa. Sebaliknya, Organisasi Muhammadiyah Ponorogo memberikan keleluasaan kepada setiap warganya untuk memilih pasangan calon sesuai hati nuraninya.

Keseimbangan antara dukungan kepada calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai media politik Organisasi Muhammadiyah dan tidak adanya *paternalistik* di dalam warga Muhammadiyah tetapi disatu sisi kecenderungan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas dari setiap warga Muhammadiyah yang berperan penting dalam mempengaruhi pilihannya dalam PEMILUKADA 2015.

Hal yang menarik dari keberagaman pilihan yang diambil oleh warga Muhammadiyah ini adalah hampir semuanya mengatakan memilih pasangan calon tersebut untuk satu tujuan yaitu "*menginginkan Ponorogo yang lebih baik*". Kecenderungan pilihan dan perhatian warga secara rasional lebih menitikberatkan wilayah administratif yaitu kota Ponorogo daripada wilayah organisasi yang juga melekat pada diri mereka yaitu organisasi Muhammadiyah. Dualisme



identitas diri ini memang kecenderungan akan memprioritaskan salah satu identitas yang mereka anggap lebih besar ruang lingkungannya dan sangat mempengaruhi hidup suatu individu. Kecondongan pilihan warga ini juga sangat dipengaruhi karena tidak adanya anjuran pilihan dari organisasi Muhammadiyah untuk mendukung salah satu pasangan calon tetapi anjuran untuk memilih calon tertentu dilakukan oleh Partai Amanat Nasional sebagai gerakan Politik warga Muhammadiyah. Tetapi sekali lagi, seperti masyarakat Jawa secara umum, warga Muhammadiyah Ponorogo menunjukkan budaya politik *paternalistic*. Budaya politik paternalistik secara pengertian adalah sebuah sikap politik yang menganggap bahwa seseorang mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan warga yang lain. Karena kelebihan yang dimiliki para elit itulah yang menjadikan warga mengikuti langkah politik yang diambil para elit Muhammadiyah. Sedangkan para elit Muhammadiyah berada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Ponorogo dan bukan di partai maka dari itu mayoritas warga Muhammadiyah memiliki sikap politik yang majemuk atau bisa dikatakan tidak satu suara dan sangat *plural*.

Dari penelitian ini maka perlu adanya saran membangun terkait dengan sikap politik warga Muhammadiyah dalam PEMILKADA Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Adapun saran yang bisa diberikan setelah terselesainya penelitian ini adalah dengan pluralnya sikap politik warga Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo maka perlu penyatuan visi misi serta arah politik yang jelas dari elit organisasi Muhammadiyah sehingga tidak terjadi perpecahan suara dari warga Muhammadiyah disaat berlangsungnya pemilihan umum baik Presiden, Legislatif ataupun Kepala Daerah. Dengan adanya arahan yang jelas tentang arah politik Muhammadiyah maka visi dan misi organisasi Muhammadiyah juga bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, dengan tidak adanya perpecahan arah politik warga Muhammadiyah maka *'kebulatan'* suara yang dimiliki Muhammadiyah akan menjadi *bergaining position* (nilai tawar) bagi organisasi Muhammadiyah untuk bisa berpengaruh didalam menentukan arah kebijakan Pemerintah. Dengan jumlah warga dan simpatisan Muhammadiyah sebanyak kurang lebih 100.000 warga maka seharusnya bisa memainkan peran politik yang strategis.

### Daftar Pustaka

- BPS. (2016). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2016*. Ponorogo: BPS Ponorogo.
- Efferin, S.Darmadji, & Y., T. (2004). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi : Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Gafar, A. (2002). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KPU. (2015). *Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Ponorogo*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- LPCR. (2012). *Tata Cara Menjadi Anggota Muhammadiyah*. Yogyakarta: LPCR PP Muhammadiyah.
- Mas'oe'd, M. (1984). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Meleong, J. L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif (ed2)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nashir, H. (2008). *Kittah Muhammadiyah tentang Politik*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Piliang, Y. A. (2004, April 25). Dua Rasionalitas Politik. *Kompas*.
- Wiharto, M. (2017, Maret 29). *Strategi Perjuangan Muhammadiyah (1)*. Dipetik November 25, 2017, dari pdmjogja.org: <https://pdmjogja.org/strategi-perjuangan-muhammadiyah-1/>
- Zainuddin M., M. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.